

Masa Depan Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan, Pemerataan, dan Daya Saing

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Rudy C Tarumingkeng : Masa Depan Ekonomi Indonesia:
Pertumbuhan, Pemerataan, dan Daya Saing

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

3 Maret 2026

MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA: PERTUMBUHAN, PEMERATAAN, DAN DAYA SAING

Pendahuluan

Ketika kita berbicara tentang masa depan ekonomi Indonesia, sesungguhnya kita sedang membicarakan tiga agenda yang tidak dapat dipisahkan: **pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing**. Pertumbuhan diperlukan agar ekonomi nasional memiliki energi untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan pendapatan. Pemerataan diperlukan agar hasil pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok, sektor, atau wilayah tertentu. Daya saing diperlukan agar pertumbuhan dan pemerataan itu tidak rapuh, melainkan berdiri di atas produktivitas, inovasi, efisiensi logistik, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan beradaptasi dalam ekonomi global yang berubah cepat. Ketiga agenda ini harus berjalan serempak, sebab pertumbuhan tanpa pemerataan mudah melahirkan ketegangan sosial, pemerataan tanpa pertumbuhan akan kekurangan sumber daya, dan pertumbuhan serta pemerataan tanpa daya saing pada akhirnya akan terbentur batas produktivitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data terbaru memberi gambaran bahwa Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menatap masa depan, tetapi fondasi itu belum boleh

dianggap cukup sebagai tujuan akhir. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh **5,11 persen**, lebih tinggi daripada 2024 yang tumbuh **5,03 persen**. Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai **Rp23.821,1 triliun**, sedangkan PDB per kapita sekitar **Rp83,7 juta** atau **US\$5.083,4**. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi, yakni **7,03 persen**, sementara Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi **56,93 persen**. Data ini menunjukkan dua hal sekaligus: mesin pertumbuhan Indonesia masih bekerja, tetapi struktur ekonomi Indonesia juga masih sangat terkonsentrasi secara spasial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di saat yang sama, indikator sosial juga memperlihatkan kemajuan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi **8,25 persen** atau sekitar **23,36 juta orang**, sedangkan **Gini ratio** turun menjadi **0,363**, lebih rendah daripada Maret 2025 maupun September 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka pada November 2025 turun menjadi **4,74 persen**, jumlah penduduk bekerja mencapai **147,91 juta orang**, dan rata-rata upah buruh tercatat **Rp3,33 juta**. Semua ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum terputus dari penurunan kemiskinan dan perbaikan pasar kerja. Akan tetapi, angka-angka ini juga belum otomatis berarti bahwa persoalan kualitas kerja, produktivitas, dan ketimpangan wilayah telah selesai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam perspektif global, masa depan ekonomi Indonesia juga harus dibaca dalam situasi yang jauh dari tenang. IMF memproyeksikan pertumbuhan global **3,3 persen pada 2026** dan **3,2 persen pada 2027**, sedangkan OECD memproyeksikan perlambatan menjadi **2,9 persen pada 2026**. WTO menilai prospek perdagangan dunia untuk 2026 memburuk akibat tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan dagang. Artinya, Indonesia sedang merancang masa depan ekonominya bukan di tengah langit yang cerah, melainkan di tengah awan tebal: perlambatan perdagangan, persaingan investasi, gejolak geopolitik, dan

perubahan strategi industri global. Dalam konteks seperti itu, kekuatan ekonomi masa depan Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada ukuran pasar domestik, tetapi harus bertumpu pada transformasi struktural yang lebih dalam. ([World Bank](#))

Esai ini bertolak dari satu argumen utama: **masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menyatukan pertumbuhan yang cukup tinggi, pemerataan yang lebih adil, dan daya saing yang lebih dalam.** Jika Indonesia hanya tumbuh tanpa pemerataan, maka pertumbuhan itu akan kehilangan legitimasi sosial. Jika Indonesia mengejar pemerataan tanpa memperkuat daya saing, maka redistribusi akan berjalan di atas basis produktivitas yang lemah. Jika Indonesia mengejar daya saing tanpa menghubungkannya dengan kesejahteraan masyarakat luas, maka kemajuan ekonomi hanya akan dinikmati oleh kantong-kantong modern tertentu. Karena itu, tantangan pembangunan Indonesia hari ini bukan memilih salah satu, tetapi merancang sintesis yang membuat ketiganya saling menguatkan. (openknowledge.worldbank.org)

I. Pertumbuhan: mengapa Indonesia masih membutuhkan mesin ekspansi yang kuat

Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan syarat dasar bagi masa depan Indonesia. Negara dengan populasi sangat besar seperti Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang cukup tinggi untuk menyerap angkatan kerja baru, memperluas basis pajak, membiayai pendidikan dan kesehatan, serta menaikkan pendapatan rumah tangga. Dalam konteks 2025, pertumbuhan **5,11 persen** jelas merupakan capaian yang patut dihargai. World Bank juga menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah memburuknya kondisi global, dan memproyeksikan pertumbuhan akan bertahan di sekitar **5,0 persen** pada 2026 dan 2027, didukung oleh investasi yang kuat dan ekspor bersih. Ini berarti

Indonesia masih memiliki kapasitas bertahan yang baik dalam jangka pendek-menengah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun pertanyaan untuk masa depan bukan hanya apakah Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan sekitar 5 persen, melainkan apakah laju itu cukup untuk mencapai cita-cita jangka panjang. Dalam kajian IMF tahun 2026, Indonesia diperkirakan memerlukan pertumbuhan riil tahunan sekitar **5,3 persen** dalam skenario dasar untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045, dan kebutuhan itu bisa lebih tinggi—sekitar **6,3 persen**—bila kondisi global kurang mendukung. World Bank dalam dokumen tentang “Golden Indonesia 2045” bahkan menempatkan sasaran pertumbuhan pada kisaran **6–8 persen**, seraya menegaskan bahwa Indonesia perlu membalik tren pelemahan produktivitas dari **2,3 persen menjadi 1,2 persen** selama periode 2011–2024. Dengan demikian, pertumbuhan 5 persen adalah fondasi yang baik, tetapi belum tentu kecepatan yang memadai bila Indonesia sungguh ingin melakukan lompatan sejarah. ([IMF](#))

Di sinilah letak perbedaan antara **pertumbuhan yang aman** dan **pertumbuhan yang cukup**. Pertumbuhan 5 persen tergolong aman karena cukup untuk menghindari krisis, mempertahankan kepercayaan pasar, dan terus menurunkan kemiskinan secara bertahap. Tetapi pertumbuhan yang cukup untuk negara besar dengan aspirasi 2045 kemungkinan harus lebih tinggi dan lebih berkualitas. Indonesia bukan sekadar ingin bertahan sebagai ekonomi stabil; Indonesia ingin menjadi ekonomi maju, dengan kelas menengah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, dan posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai global. Maka, pertumbuhan ke depan harus dipandang bukan sebagai rutinitas statistik tahunan, melainkan sebagai bagian dari strategi konvergensi pendapatan dan produktivitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tetapi angka pertumbuhan saja tidak boleh dipuja berlebihan. Pertumbuhan yang tinggi namun rapuh—misalnya didorong oleh

stimulus jangka pendek, ekspansi fiskal yang tidak efisien, atau ledakan komoditas semata—dapat menghasilkan ilusi kemajuan. Karena itu, masa depan ekonomi Indonesia menuntut **pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus lebih sehat**. IMF menekankan bahwa investasi publik yang lebih besar harus dibarengi efisiensi yang lebih tinggi dan mobilisasi pendapatan tambahan. World Bank menekankan bahwa pertumbuhan yang lebih cepat harus ditopang reformasi yang memungkinkan dunia usaha berkembang dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Dalam arti ini, pertumbuhan yang benar bukan sekadar soal angka, tetapi soal kualitas mesin yang menghasilkannya. ([IMF](#))

II. Pemerataan: ketika pertumbuhan harus dirasakan lebih luas

Agenda kedua adalah pemerataan. Dalam teori pembangunan, pertumbuhan sering kali datang lebih dahulu daripada pemerataan. Tetapi dalam praktik politik-ekonomi sebuah negara demokratis yang besar seperti Indonesia, pertumbuhan yang tidak terasa luas akan segera dipertanyakan. Data BPS menunjukkan perbaikan yang berarti pada indikator pemerataan dasar: kemiskinan turun ke **8,25 persen**, dan **Gini ratio** turun ke **0,363** pada September 2025. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang bergerak ke arah ketimpangan yang tak terkendali. Bahkan, penurunan Gini ratio dibanding Maret 2025 dan September 2024 memperlihatkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun pemerataan di Indonesia tidak boleh dibaca hanya dari dua indikator tersebut. Pemerataan juga harus dibaca dari struktur wilayah. Pada 2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menyumbang **56,93 persen** ekonomi nasional. Dominasi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, pusat gravitasi ekonominya masih sangat terkonsentrasi. Pulau Jawa memang menjadi lokomotif produksi, jasa, dan konsumsi. Tetapi bila konsentrasi ini terlalu bertahan lama, maka pemerataan antardaerah akan bergerak lebih

lambat, biaya logistik nasional tetap tinggi, dan potensi ekonomi luar Jawa berisiko tidak berkembang optimal. Masa depan ekonomi Indonesia yang sehat tidak bisa terlalu berat sebelah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pemerataan juga berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan. BPS mencatat pengangguran turun menjadi **4,74 persen** dan jumlah penduduk bekerja meningkat. Ini adalah kemajuan yang nyata. Tetapi World Bank menekankan bahwa Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak pekerjaan, melainkan **better jobs**—pekerjaan yang lebih produktif, lebih formal, berupah lebih baik, dan memberi kesempatan mobilitas sosial. Bila pertumbuhan hanya menciptakan pekerjaan dalam sektor bernilai tambah rendah, maka pendapatan rumah tangga akan naik sangat pelan. Pertumbuhan yang secara statistik mengesankan belum tentu terasa cukup di tingkat keluarga. Dalam jangka panjang, pemerataan yang lebih bermakna mensyaratkan struktur pekerjaan yang lebih berkualitas, bukan sekadar bertambahnya orang yang bekerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Mari kita bayangkan dua skenario sederhana. Pada skenario pertama, sebuah kabupaten di luar Jawa mengalami pertumbuhan karena proyek besar yang terkonsentrasi pada satu industri ekstraktif. PDRB naik, tetapi sebagian besar keuntungan mengalir keluar daerah, pasar kerja lokal hanya menyerap tenaga kerja berupah rendah, dan UMKM setempat tidak tumbuh signifikan. Secara statistik, daerah itu tumbuh. Tetapi secara substantif, pemerataannya lemah. Pada skenario kedua, pertumbuhan daerah ditopang kombinasi industri pengolahan, logistik, pendidikan vokasi, digitalisasi UMKM, dan peningkatan konektivitas. Di sini pertumbuhan lebih lambat pada awalnya, tetapi hasilnya lebih menyebar dan lebih tahan lama. Perbedaan antara kedua skenario itu menunjukkan bahwa pemerataan bukan hasil otomatis dari pertumbuhan; ia membutuhkan desain kebijakan. Penalaran ini sejalan dengan temuan World Bank dan IMF yang sama-sama menekankan

pentingnya reformasi horizontal—logistik, regulasi, modal manusia—agar manfaat pertumbuhan menjangkau lebih luas.

(openknowledge.worldbank.org)

Pemerataan juga menyentuh isu **daya beli**. Inflasi tahunan pada Februari 2026 mencapai **4,76 persen**, lebih tinggi daripada Januari 2026 yang sebesar **3,55 persen**. Secara makro, Bank Indonesia masih memandangi inflasi 2026–2027 akan bisa dijaga dalam sasaran **2,5±1 persen**. Tetapi dari perspektif rumah tangga, terutama kelompok rentan, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pendapatan mereka dapat mengejar harga kebutuhan dasar. Jadi, pemerataan tidak hanya berbicara tentang distribusi pendapatan antarkelompok, tetapi juga tentang kemampuan negara menjaga stabilitas harga agar kelompok bawah tidak menanggung porsi beban yang lebih besar. Ketika harga pangan dan kebutuhan pokok naik, kelompok miskin dan rentan selalu yang paling terkena. Karena itu, agenda pemerataan di Indonesia harus selalu dibaca sebagai agenda pertumbuhan yang sensitif terhadap biaya hidup.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](https://www.bps.go.id))

III. Daya saing: syarat agar pertumbuhan dan pemerataan tidak rapuh

Jika pertumbuhan adalah mesin dan pemerataan adalah arah sosial, maka daya saing adalah **daya tahan sistemnya**. Negara yang tumbuh tanpa daya saing akan cepat kelelahan. Negara yang pemeratakan hasil tanpa memperkuat daya saing akan kehabisan ruang fiskal dan produktivitas. Karena itu, masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuannya meningkatkan daya saing secara menyeluruh: biaya logistik yang lebih rendah, kepastian kebijakan yang lebih tinggi, human capital yang lebih kuat, jasa modern yang lebih dalam, serta integrasi yang lebih cerdas dengan ekonomi dunia.

(openknowledge.worldbank.org)

Salah satu temuan paling penting dari laporan World Bank *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia* adalah bahwa reformasi sektor jasa dapat mendorong pertumbuhan PDB Indonesia ke kisaran **5,3–5,5 persen pada 2026–2027**. Ini temuan yang sangat strategis, karena menunjukkan bahwa masa depan daya saing Indonesia tidak hanya terletak pada industri pengolahan atau komoditas, tetapi juga pada kualitas jasa yang menopang seluruh aktivitas ekonomi: logistik, pergudangan, jasa profesional, teknologi informasi, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan layanan digital lainnya. Dalam ekonomi modern, jasa yang kompetitif bukan pelengkap dari industri; ia adalah salah satu fondasi utamanya. (openknowledge.worldbank.org)

IMF memperluas argumen ini dari sisi perdagangan dan biaya ekonomi. Dalam kajian “Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade,” IMF menyatakan bahwa pendalaman keterbukaan dagang, khususnya melalui pengurangan **non-tariff barriers**, ditambah reformasi logistik dan modal manusia, dapat membuat Indonesia benar-benar “open for business” di tengah pergeseran rantai pasok global. IMF juga menunjukkan bahwa perbaikan logistik dan human capital dapat menurunkan biaya perdagangan dan memperluas keunggulan komparatif Indonesia. Dengan kata lain, daya saing Indonesia bukan hanya persoalan tarif atau kurs, melainkan persoalan kualitas ekosistem. Barang Indonesia tidak akan kompetitif bila pelabuhannya lambat, logistiknya mahal, konektivitas digitalnya timpang, dan tenaganya kurang terampil. (IMF)

Daya saing juga terkait erat dengan **investasi publik dan swasta**. Kementerian Investasi/BKPM melaporkan bahwa realisasi investasi 2025 mencapai **Rp1.931,2 triliun**, dengan investasi hilirisasi **Rp584,1 triliun**, naik **43,3 persen**. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia tetap menarik sebagai tujuan modal. Tetapi IMF dalam kajian tentang investasi publik menekankan bahwa peningkatan investasi harus dibarengi dengan peningkatan efisiensi. Negara bisa saja membelanjakan lebih banyak

untuk infrastruktur, pendidikan, atau kawasan industri, tetapi bila kualitas proyek rendah, konektivitas tidak terintegrasi, dan reformasi pendukung tidak berjalan, maka dampaknya terhadap produktivitas akan terbatas. Jadi, daya saing bukan sekadar soal “berapa banyak investasi masuk”, melainkan “bagaimana investasi itu diterjemahkan menjadi produktivitas nasional.” (bkpm.go.id)

Satu aspek lain yang sangat menentukan adalah **fondasi digital**. Laporan World Bank *Digital Foundations for Growth* menyebut bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, tetapi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan masa depan akan sangat ditentukan oleh kualitas fondasi digitalnya. Konektivitas yang lebih cepat dan lebih merata, kepercayaan digital, identitas dan pembayaran digital, interoperabilitas data pemerintah, dan kualitas GovTech dapat memperbesar efisiensi di hampir semua sektor. Dalam bahasa yang lebih sederhana, daya saing masa depan Indonesia tidak lagi hanya diukur dari jalan raya, pelabuhan, dan pabrik, tetapi juga dari server, data, software, dan kualitas integrasi sistemnya. Negara yang gagal mengembangkan fondasi digital akan tertinggal bahkan jika infrastrukturnya terlihat megah. (World Bank)

IV. Ketahanan makro: prasyarat bagi masa depan yang lebih ambisius

Sering kali ketika kita berbicara tentang transformasi, daya saing, dan masa depan, kita tergoda untuk melupakan hal yang tampak “membosankan”, yaitu stabilitas makroekonomi. Padahal tanpa stabilitas makro, semua agenda ambisius akan rapuh. Bank Indonesia mempertahankan **BI-Rate 4,75 persen** pada Februari 2026 dengan fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan sasaran inflasi 2026–2027. BI juga menyebut cadangan devisa akhir Januari 2026 sebesar **US\$154,6 miliar**, setara **6,3 bulan impor** atau **6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah**. Ini adalah bantalan yang sangat penting

dalam ekonomi dunia yang penuh gejolak. Negara yang ingin berlari cepat justru harus memastikan kakinya menapak pada tanah yang stabil. (bi.go.id)

Fiskal juga memainkan peran serupa. Kementerian Keuangan melalui APBN KiTa Februari 2026 mencatat pendapatan negara **Rp172,7 triliun** dan belanja negara **Rp227,3 triliun** hingga akhir Januari, dengan defisit **Rp54,6 triliun** atau sekitar **0,21 persen PDB**. Kemenkeu menekankan bahwa fondasi makro yang tetap solid memberi ruang bagi APBN 2026 untuk bekerja lebih progresif menjaga stabilitas sekaligus mengakselerasi pertumbuhan dengan tetap menjaga kredibilitas. Ini penting untuk masa depan ekonomi Indonesia, karena menunjukkan bahwa APBN tidak hanya harus berfungsi sebagai pengaman ketika dunia bergejolak, tetapi juga sebagai instrumen transformasi: membiayai infrastruktur yang tepat, pendidikan yang relevan, kesehatan yang produktif, dan perlindungan sosial yang menjaga daya beli. (media.kemenkeu.go.id)

Ketahanan makro yang sehat juga berarti Indonesia memiliki ruang untuk memilih strategi jangka panjang, bukan sekadar bereaksi terhadap krisis. Negara yang selalu sibuk memadamkan kebakaran moneter atau fiskal sulit membangun agenda industrialisasi, reformasi jasa, atau peningkatan kualitas SDM. Karena itu, masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan: stabilitas makro tetap dijaga, tetapi tidak dijadikan alasan untuk puas. Stabilitas harus dipahami sebagai **platform**, bukan **garis finis**. Ini sejalan dengan nada keseluruhan laporan IMF dan World Bank yang sama-sama melihat Indonesia sebagai ekonomi yang cukup tangguh, tetapi masih membutuhkan reformasi mendalam agar ketangguhan itu berubah menjadi lompatan. (World Bank)

V. Tantangan besar: bagaimana menyatukan pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing

Tantangan terbesar bagi Indonesia bukan sekadar meningkatkan satu indikator tertentu, melainkan menghindari situasi di mana kemajuan pada satu sisi justru menghambat sisi lain. Misalnya, dorongan pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada proyek besar berpotensi memperkuat pertumbuhan, tetapi belum tentu memperdalam pemerataan. Sebaliknya, kebijakan redistribusi yang tidak diiringi perluasan basis produktivitas bisa membantu jangka pendek, tetapi tidak memperkuat daya saing jangka panjang. Atau, reformasi demi daya saing yang hanya berfokus pada efisiensi biaya tanpa memperhatikan perlindungan sosial dapat menimbulkan resistensi politik dan ketegangan sosial. Jadi, persoalan masa depan Indonesia bukan memilih prioritas tunggal, melainkan menemukan **arsitektur kebijakan** yang membuat tiga agenda itu saling menopang.

(openknowledge.worldbank.org)

Dalam bahasa praktis, arsitektur itu setidaknya membutuhkan lima simpul. Pertama, **produktivitas** harus naik. Kedua, **pemerataan wilayah** harus dipercepat, bukan dibiarkan menunggu efek tetesan yang terlalu lambat. Ketiga, **pekerjaan berkualitas** harus menjadi target utama, bukan sekadar serapan tenaga kerja. Keempat, **jasa modern dan fondasi digital** harus diperlakukan sebagai mesin pertumbuhan inti. Kelima, **kebijakan makro** harus menjaga agar inflasi, kurs, dan fiskal tetap terkendali sehingga reformasi tidak dihancurkan oleh instabilitas. Jika satu simpul tertinggal, maka kemajuan pada simpul lain akan terbatas. ([World Bank](https://www.worldbank.org))

Untuk melihat pentingnya keterkaitan ini, kita dapat memakai narasi sederhana. Bayangkan sebuah provinsi di luar Jawa yang diberi kawasan industri baru. Jika jalan dan pelabuhan dibangun, tetapi pendidikan vokasinya tidak disiapkan, maka industri akan kekurangan tenaga terampil. Jika tenaga terampil tersedia, tetapi layanan logistik dan digital buruk, maka biaya produksi tetap tinggi. Jika logistik membaik, tetapi UMKM lokal tidak dilibatkan, maka pemerataan manfaat lemah. Jika

semua berjalan, tetapi inflasi tinggi dan kurs bergejolak, maka dunia usaha tetap berhitung ulang. Contoh semacam ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi modern bukan proses linear, melainkan sistem yang saling bergantung. Itulah sebabnya masa depan ekonomi Indonesia hanya bisa dibangun dengan pendekatan yang simultan, bukan sektoral semata. Penalaran ini sepenuhnya selaras dengan penekanan World Bank dan IMF pada reformasi horizontal, iklim usaha, logistik, human capital, dan efisiensi investasi publik. ([IMF](#))

VI. Skenario masa depan Indonesia

Masa depan ekonomi Indonesia dapat dibayangkan dalam tiga skenario besar. **Skenario pertama** adalah skenario **stabil tetapi datar**. Dalam skenario ini, Indonesia mempertahankan pertumbuhan di sekitar 5 persen, menjaga inflasi dan defisit tetap terkendali, menarik investasi tertentu, dan terus menurunkan kemiskinan secara bertahap. Namun produktivitas tidak melonjak, kedalaman industri terbatas, dan pemerataan wilayah berjalan lambat. Ini adalah skenario yang relatif aman, tetapi risiko utamanya adalah Indonesia masuk terlalu lama ke dalam zona nyaman dan kehilangan momentum demografis untuk naik kelas. World Bank dan IMF pada dasarnya memberi peringatan terhadap kemungkinan seperti ini ketika mereka menekankan perlunya reformasi produktivitas dan business-enabling reforms. ([World Bank](#))

Skenario kedua adalah skenario **cepat tetapi rapuh**. Dalam skenario ini, Indonesia berusaha mengejar pertumbuhan jauh lebih tinggi dengan dorongan investasi besar dan ekspansi cepat, tetapi tanpa cukup perhatian pada efisiensi, kualitas belanja, dan stabilitas makro. Pertumbuhan mungkin melonjak sesaat, tetapi biaya logistik, inefisiensi proyek, tekanan kurs, dan inflasi dapat dengan cepat mengurangi hasilnya. IMF secara jelas mengingatkan bahwa peningkatan investasi publik harus diiringi peningkatan efisiensi dan mobilisasi pendapatan. Ini

berarti percepatan yang tidak hati-hati justru dapat mengancam daya tahan ekonomi dalam jangka menengah. ([IMF](#))

Skenario ketiga adalah skenario **transformasi berjangkar**. Dalam skenario ini, Indonesia menjaga stabilitas makro sambil secara bertahap namun konsisten mempercepat reformasi produktivitas, jasa, logistik, perdagangan, human capital, digitalisasi, dan pemerataan wilayah. Pertumbuhan mungkin bergerak dari sekitar 5 persen menuju 5,3–5,5 persen terlebih dahulu, sebagaimana diisyaratkan laporan World Bank tentang jasa, lalu meningkat lebih jauh bila reformasi makin matang dan kualitas investasi membaik. Ini adalah skenario yang paling sulit secara politik dan administrasi, tetapi paling menjanjikan secara historis. Bukan karena ia menawarkan hasil instan, melainkan karena ia menggabungkan ketahanan dengan perubahan struktural. (openknowledge.worldbank.org)

VII. Agenda kebijakan untuk masa depan yang lebih kuat

Pertama, Indonesia perlu memperlakukan **pertumbuhan** sebagai proyek produktivitas, bukan sekadar proyek permintaan. Ini berarti fokus kebijakan harus bergeser ke iklim usaha, logistik, kualitas institusi, jasa modern, serta efisiensi investasi. Kedua, Indonesia perlu menjadikan **pemerataan** sebagai strategi perluasan basis pertumbuhan, bukan hanya sebagai koreksi pasca-pertumbuhan. Pemerataan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan konektivitas di luar Jawa bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi juga kebijakan ekspansi ekonomi nasional. Ketiga, Indonesia harus menempatkan **daya saing** sebagai persoalan sistemik: dari pelabuhan sampai data center, dari vokasi sampai kepastian perizinan. (openknowledge.worldbank.org)

Keempat, agenda **hilirisasi** harus diperdalam. Kenaikan investasi hilirisasi sebesar **43,3 persen** pada 2025 adalah modal yang sangat penting. Tetapi hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan awal. Ia perlu bergerak ke manufaktur lanjutan, jasa teknik, penelitian, pemasok lokal,

dan ekosistem keterampilan. Tanpa itu, nilai tambah yang naik belum tentu mengubah struktur ekonomi nasional secara mendalam. Data BKPM menunjukkan momentum sudah ada; tantangannya adalah mengubah momentum itu menjadi kedalaman. (bkpm.go.id)

Kelima, Indonesia perlu memperkuat **fondasi digital** dan **kedalaman keuangan**. Digitalisasi yang produktif akan mempercepat efisiensi di berbagai sektor, sedangkan pendalaman keuangan akan membantu usaha-usaha produktif mendapatkan pembiayaan untuk naik kelas.

Keenam, Indonesia harus menjaga **APBN** tetap kredibel, tetapi juga lebih strategis: bukan sekadar membelanjakan uang negara, melainkan membangun kapasitas negara. Ketujuh, Bank Indonesia dan otoritas ekonomi perlu terus menjaga bahwa stabilitas moneter, inflasi, dan kurs tetap mendukung agenda transformasi, bukan hanya bertahan dari guncangan jangka pendek. Semua agenda ini pada akhirnya berpulang pada satu kata kunci: **konsistensi**. (World Bank)

Penutup

Masa depan ekonomi Indonesia tidak akan ditentukan oleh satu variabel tunggal. Ia tidak akan ditentukan hanya oleh angka pertumbuhan, hanya oleh penurunan kemiskinan, atau hanya oleh masuknya investasi. Masa depan itu akan ditentukan oleh kualitas hubungan antara

pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing. Indonesia sudah memiliki banyak modal awal yang baik: pertumbuhan **5,11 persen** pada 2025, kemiskinan yang turun ke **8,25 persen**, Gini ratio yang membaik ke **0,363**, pengangguran yang turun ke **4,74 persen**, cadangan devisa **US\$154,6 miliar**, dan investasi yang tetap kuat. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan ekonomi yang lemah. Tetapi semua itu juga belum otomatis berarti bahwa Indonesia sudah berada di lintasan optimal menuju 2045. (Badan Pusat Statistik Indonesia)

Karena itu, pertanyaan besar untuk masa depan bukan "apakah Indonesia bisa terus tumbuh?", melainkan "apakah Indonesia bisa

tumbuh dengan kualitas yang cukup untuk memperluas kesejahteraan dan memperkuat posisi bersaingnya?" Jika Indonesia berhasil menaikkan produktivitas, mempercepat pemerataan wilayah, memperdalam jasa modern, memperbaiki logistik, memanfaatkan digitalisasi, dan menjaga stabilitas makro, maka masa depannya cukup menjanjikan. Tetapi jika Indonesia terlalu lama puas pada stabilitas dan pertumbuhan moderat tanpa reformasi struktur, maka potensi besarnya bisa tereduksi menjadi pertumbuhan yang aman namun tidak transformatif.

(openknowledge.worldbank.org)

Dalam pengertian itu, masa depan ekonomi Indonesia bukan terutama soal ramalan, melainkan soal pilihan. Indonesia bisa memilih menjadi ekonomi besar yang stabil tetapi bergerak lambat, atau menjadi ekonomi besar yang memakai stabilitasnya sebagai pijakan untuk berlari lebih jauh. Di situlah makna terdalam dari tema ini: **masa depan ekonomi Indonesia akan baik sejauh Indonesia berani membuat pertumbuhan, pemerataan, dan daya saing tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu strategi nasional yang utuh.**

([World Bank](https://www.worldbank.org))

Berikut **Glosarium** dan **Referensi** untuk makalah "**Masa Depan Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan, Pemerataan, dan Daya Saing.**"

Daftar ini disusun agar konsisten dengan naskah sebelumnya yang bertumpu pada data resmi BPS, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BKPM, IMF, World Bank, WTO, dan OECD. Angka-angka kunci yang melatarbelakangi tema ini antara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia **5,11 persen** pada 2025, kemiskinan **8,25 persen** pada September 2025, Gini ratio **0,363**, TPT **4,74 persen**, BI-Rate **4,75 persen**, dan cadangan

devisa **US\$154,6 miliar** pada Januari 2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Glosarium

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara.

Cadangan devisa

Aset luar negeri yang dimiliki bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mendukung pembayaran internasional, dan memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Daya beli

Kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa berdasarkan pendapatan yang dimiliki serta tingkat harga yang berlaku.

Daya saing

Kemampuan suatu negara, sektor, atau perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, bermutu, dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Defisit fiskal

Keadaan ketika total belanja negara lebih besar daripada total pendapatan negara dalam satu periode anggaran.

Digitalisasi produktif

Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas layanan, dan nilai tambah ekonomi.

Diversifikasi ekonomi

Upaya memperluas sumber pertumbuhan agar ekonomi tidak terlalu bergantung pada satu sektor, komoditas, atau wilayah tertentu.

Ekspor

Penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri.

Ekspor bersih

Selisih antara nilai ekspor dan nilai impor.

Fondasi digital

Infrastruktur dan sistem dasar yang mendukung ekonomi digital, seperti internet, pusat data, identitas digital, interoperabilitas sistem, dan keamanan siber.

Gini ratio

Indikator ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Nilai yang lebih kecil menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah. Dalam rilis BPS, Gini ratio Indonesia pada September 2025 tercatat **0,363**.
([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Good jobs / pekerjaan berkualitas

Pekerjaan yang produktif, relatif aman, berupah layak, dan memberi peluang pengembangan keterampilan serta mobilitas sosial.

Hilirisasi

Proses peningkatan nilai tambah melalui pengolahan komoditas atau bahan mentah menjadi produk antara atau produk akhir.

Inflasi

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode.

Inflasi inti

Inflasi yang mencerminkan tekanan harga yang lebih mendasar, setelah

mengecualikan komponen yang sangat bergejolak dan harga yang diatur pemerintah.

Investasi

Penanaman modal untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, atau memperoleh manfaat ekonomi di masa depan.

Investasi publik

Belanja pemerintah untuk aset atau proyek yang menambah kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sistem logistik.

Ketahanan domestik

Kemampuan ekonomi nasional bertahan dari guncangan dengan bertumpu pada konsumsi, investasi, pasar kerja, kebijakan fiskal, dan sistem keuangan domestik.

Ketimpangan wilayah

Perbedaan tingkat pembangunan, pendapatan, produktivitas, dan akses layanan antarwilayah.

Kurs / nilai tukar

Harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain.

Modal manusia (human capital)

Kualitas tenaga kerja yang tercermin dari pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan produktif.

Neraca perdagangan

Selisih antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara dalam periode tertentu.

Nilai tambah

Peningkatan nilai ekonomi suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, pengolahan, distribusi, atau inovasi.

PDB (Produk Domestik Bruto)

Nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara selama periode tertentu.

PDB per kapita

PDB dibagi jumlah penduduk; digunakan sebagai indikator kasar tingkat pendapatan rata-rata.

Pemerataan

Distribusi hasil pembangunan yang lebih luas antarindividu, antarkelompok sosial, dan antarwilayah.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen investasi dalam PDB yang mencerminkan pengeluaran untuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan peralatan produksi.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output yang lebih besar atau lebih baik dari sejumlah input tertentu.

Prospek ekonomi

Perkiraan arah perkembangan ekonomi pada masa mendatang berdasarkan kondisi terkini, risiko, dan peluang yang ada.

Reformasi struktural

Perubahan kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, dan kualitas pertumbuhan.

Sektor jasa modern

Kelompok jasa bernilai tambah tinggi seperti logistik, teknologi informasi, jasa profesional, keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Stabilisasi makroekonomi

Serangkaian kebijakan untuk menjaga inflasi, pertumbuhan, fiskal, kurs, dan sistem keuangan tetap terkendali.

Transformasi struktural

Perubahan komposisi ekonomi dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor yang lebih modern, produktif, dan bernilai tambah tinggi.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. BPS mencatat TPT Indonesia pada November 2025 sebesar **4,74 persen**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Volatilitas pasar keuangan

Perubahan cepat dan tidak stabil pada harga aset, suku bunga, nilai tukar, dan arus modal.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Gini Ratio September 2025 Tercatat Sebesar 0,363*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 19 Februari). *BI-Rate Tetap 4,75%: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Memperkuat Stabilitas Nilai Tukar Rupiah, dan Tetap Menjaga Inflasi dalam Sasaran*. ([Bank Indonesia](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, Februari). *APBN KiTa Februari 2026: Kinerja Fiskal Kuat dan Berdampak Nyata.*

(media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, 15 Januari). *Realisasi Investasi 2025 Lampau Target, Hilirisasi Melompat 43,3 Persen.* ([BKPM](#))

International Monetary Fund. (2026, 19 Januari). *World Economic Outlook Update, January 2026: Global Economy—Steady amid Divergent Forces.*

([Bank Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2026, 21 Januari). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia.* ([Bank Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2026, 3 Februari). *Golden Vision 2045: Reaping the Gains from Trade.* ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026, 3 Februari). *Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment: Indonesia.* ([IMF](#))

World Bank. (2026). *Running Faster, for Longer: Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs.* (openknowledge.worldbank.org)

World Bank. (2026). *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia.* (openknowledge.worldbank.org)

World Bank. (2025). *Digital Foundations for Growth.* Dokumen ini dipakai untuk konteks fondasi digital dan transformasi ekonomi Indonesia.

([World Bank](#))

World Trade Organization. (2025, Oktober). *Global Trade Outlook and Statistics Update: October 2025.* ([World Trade Organization](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025, 2 Desember). *Global Economy Proves Resilient but Remains Fragile.* ([OECD](#))

Rudy C Tarumingkeng : Masa Depan Ekonomi Indonesia:
Pertumbuhan, Pemerataan, dan Daya Saing

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 3 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a656ea-0748-839f-a31a-f04772dc26c8>